

Integrasi Good Amil Governance dan Sustainable Development Goals (SDGs): Tantangan dan Peluang

Kusmilawaty¹⁾, M. Fizardi Arismunandar²⁾, Ahmad Alauddin Sultoni³⁾, Saparuddin Siregar⁴⁾, Yenni Samri Juliati Nasution⁵⁾

^{1,2,3,4,5}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: kusmilawaty@uinsu.ac.id¹, fizardian01@gmail.com², alauddinsultoni@gmail.com³, saparuddin.siregar@uinsu.ac.id⁴, yenni.samri@uinsu.ac.id⁵

Abstrak

Zakat memiliki potensi besar dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya dalam hal pengentasan kemiskinan, peningkatan kesehatan, pendidikan berkualitas, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengeksplorasi tantangan yang dihadapi serta peluang dalam mengintegrasikan Good Amil Governance dengan SDGs. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan mengumpulkan informasi dari artikel, buku, dan laporan yang relevan mengenai Good Amil Governance pada lembaga zakat dan SDGs. Analisis juga mencakup bagaimana zakat berkontribusi terhadap pencapaian beberapa tujuan dalam SDGs, seperti pengurangan kemiskinan dan peningkatan pendidikan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis tematik. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa tantangan dalam mengintegrasikan Good Amil Governance dengan pencapaian SDGs di Indonesia meliputi kurangnya kesadaran dan pemahaman, keterbatasan sumber daya, regulasi dan kebijakan yang kurang mendukung, serta kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Namun, di tengah tantangan tersebut, terdapat beberapa peluang, yaitu pendidikan dan pelatihan, pengembangan kebijakan yang mendukung, pemanfaatan teknologi informasi, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Kata kunci: Zakat, Good Amil Governance, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Abstract

Zakat has great potential in supporting the achievement of the Sustainable Development Goals, especially in terms of poverty alleviation, health improvement, quality education, and inclusive economic growth. This research uses a qualitative descriptive approach to explore the challenges faced and opportunities in integrating Good Amil Governance and Sustainable Development Goals (SDGs). Data collection is carried out through literature studies by collecting information from relevant articles, books, and reports on Good Amil Governance of zakat institutions and the SDGs. This includes an analysis of how zakat has contributed to the achievement of certain goals in the SDGs, such as poverty reduction and education improvement. The data obtained were then analyzed using the thematic analysis method. The findings reveal that The challenges faced in integrating Good Amil Governance with the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia are Lack of Awareness and Understanding, Limited Resources, Unsupportive Regulations and Policies, and Uncoordination Between Stakeholders. However, in the face of these challenges, we still have several opportunities, namely Education and Training, Supportive

Policy Development, Use of Information Technology, and Collaboration Between Stakeholders.

Keywords: Zakat, Good Amil Governance; Sustainable Development Goals

1. PENDAHULUAN

Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Dalam konteks global saat ini, di mana tantangan pembangunan berkelanjutan semakin mendesak, integrasi manajemen zakat dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) menjadi semakin relevan. SDGs, yang terdiri dari 17 tujuan yang disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan melindungi lingkungan hingga tahun 2030 (Wahyuni, 2024).

Oleh karena itu, pengelolaan zakat yang efektif dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian tujuan-tujuan ini, terutama dalam konteks pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di berbagai negara, pengelolaan zakat menjadi fokus dalam rangka memastikan penyaluran zakat yang tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap lembaga zakat untuk beroperasi lebih transparan dan efisien, sejalan dengan dinamika kebutuhan penerima manfaat yang terus tumbuh (Nurhasanah, 2023).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa zakat memiliki potensi besar dalam mendukung pencapaian SDGs, terutama dalam hal pengurangan kemiskinan, peningkatan kesehatan, pendidikan berkualitas, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Rizal, Ghofur, & Utami, 2023). Misalnya, zakat dapat digunakan untuk mendanai program-program yang langsung berkontribusi pada tujuan SDG, seperti penyediaan pendidikan bagi anak-anak kurang mampu dan dukungan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan memanfaatkan dana zakat secara optimal, lembaga zakat dapat memainkan peran kunci dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Alshehadeh, 2024).

Namun, untuk mencapai sinergi antara *Good Amil Governance* dan SDGs, diperlukan pendekatan yang sistematis dan terencana. Hal ini mencakup penguatan kapasitas lembaga zakat, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan zakat (Narulitasari, 2023). Selain itu, sosialisasi yang efektif mengenai SDGs kepada muzakki (pemberi zakat) juga penting untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi mereka dalam program-program zakat yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (Syiafuddin, 2019).

BAZNAS sendiri, sebagai lembaga resmi yang mengelola zakat di Indonesia, masih menghadapi beberapa kendala terkait *Good Amil Governance* yang belum sepenuhnya optimal. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain: (1) Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola zakat sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola modern; (2) Sistem teknologi belum terintegrasi dengan baik, sehingga sulit untuk melaporkan secara akurat dan transparan; (3) Perlunya peningkatan pengawasan internal untuk mencegah penyalahgunaan dana zakat; (4) Kurangnya sistem pengukuran kinerja amil yang objektif untuk mengevaluasi efektivitas program zakat.

Beberapa penelitian telah menunjukkan hubungan yang signifikan antara pengelolaan zakat dan pencapaian SDGs, terutama dalam hal pengentasan kemiskinan, peningkatan kesehatan, pendidikan, dan pengurangan ketimpangan. Wahyuni (Wahyuni, 2024) menegaskan bahwa zakat memainkan peran penting dalam mencapai berbagai tujuan SDGs, termasuk pengurangan kemiskinan, penghapusan kelaparan, dan peningkatan kesehatan serta kesejahteraan global. Penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi distribusi dan pemanfaatan dana zakat dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan-tujuan tersebut, dengan penekanan pada perlunya sosialisasi mendalam mengenai SDGs kepada masyarakat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai alat distribusi kekayaan, tetapi juga sebagai sarana untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, lembaga zakat perlu mengadopsi pendekatan yang lebih terintegrasi untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.

Ahyani (Ahyani, et al., 2025) mengkaji peran hukum Islam progresif dalam distribusi zakat dan kontribusinya terhadap pencapaian SDGs di Indonesia, dengan fokus pada tujuan-tujuan seperti pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan. Penelitian ini menekankan bahwa prinsip-prinsip maqasid syariah dapat digunakan untuk mempromosikan keadilan dan kesetaraan, yang sejalan dengan tujuan SDGs.

Othman (Othman, Yusuff, & Moawad, 2021) melakukan analisis terhadap zakat sebagai instrumen keuangan sosial untuk membantu mencapai SDGs di Kedah, Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi zakat di Kedah sejalan dengan tujuan SDGs, dan ada potensi besar untuk mencapai tujuan tersebut jika lembaga zakat melakukan penyesuaian dan perbaikan tertentu dalam praktik distribusi mereka.

Isman (Isman & Amalia, 2022) menyoroti relevansi maqasid al-shariah dalam pencapaian SDGs di lembaga zakat di Indonesia, menunjukkan bahwa terdapat hubungan kausal antara zakat dan pembangunan ekonomi. Penelitian ini mengidentifikasi lima tujuan kunci yang dapat dicapai melalui program zakat, termasuk pengurangan kemiskinan dan penyediaan pendidikan berkualitas.

Nurhasanah (Nurhasanah, 2023) menekankan bahwa zakat, sebagai instrumen keuangan yang berakar pada prinsip maqasid syariah, sangat selaras dengan nilai-nilai dan tujuan SDGs. Penelitian ini menunjukkan bahwa zakat dapat menjadi sarana bagi individu untuk berkontribusi secara finansial terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Secara keseluruhan, literatur yang ada menunjukkan bahwa terdapat sinergi yang kuat antara manajemen zakat dan pencapaian SDGs.

Dengan mengoptimalkan pengelolaan zakat dan memastikan bahwa praktik distribusi sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, lembaga zakat dapat berkontribusi secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan pencapaian tujuan sosial yang lebih luas. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi strategi konkret yang dapat diimplementasikan oleh lembaga zakat dalam mendukung SDGs secara efektif.

Dalam artikel ini, kami akan membahas pentingnya sinkronisasi antara *Good Amil Governance* dan SDGs, tantangan yang dihadapi serta peluang yang dimiliki untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan memahami hubungan antara zakat dan SDGs, diharapkan dapat tercipta sinergi yang lebih baik dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana zakat dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, dengan fokus pada pengelolaan yang efisien dan kolaboratif antara lembaga zakat dan pemangku kepentingan lainnya. Untuk itu, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengeksplorasi bagaimana tantangan yang dihadapi serta peluang yang dimiliki dalam mengintegrasikan *Good Amil Governance* dan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Pendekatan kualitatif akan memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena ini secara komprehensif, serta memberikan ruang untuk penambahan data yang lebih kontekstual (Creswell, 2014).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan mengumpulkan informasi dari artikel, buku, dan laporan yang relevan mengenai *Good Amil Governance* institusi zakat dan SDGs. Ini termasuk analisis tentang bagaimana zakat telah berkontribusi terhadap pencapaian tujuan-tujuan tertentu dalam SDGs, seperti pengurangan kemiskinan dan peningkatan pendidikan.

Data yang diperoleh, selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis tematik. Analisis tematik adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola (tema) dalam data (Braun & Clarke, 2006). Pendekatan analisis data interaktif juga digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan ini melibatkan siklus pengumpulan data, pengurangan data, penyajian data, dan kesimpulan menggambar (Miles, Huberman, & Saldana, 2014). Data yang telah dikumpulkan akan dikurangi dengan memilih informasi yang paling relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Setelah itu, data yang dikurangi akan disajikan dalam bentuk temuan tematik, dan kesimpulan akan ditarik berdasarkan analisis tematik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

Good Amil Governance

Tata Kelola Zakat secara spesifik disebut dengan *Good Amil Governance*. Perapan prinsip-prinsip *Good Amil Governance* dalam institusi zakat merupakan langkah penting untuk memastikan pengelolaan zakat dilakukan secara transparan dan akuntabel. *Good Amil Governance* mencakup berbagai aspek, antara lain struktur organisasi, proses pengambilan keputusan, pelaporan, dan akuntabilitas kepada publik. Pada dasarnya, penerapan prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat, sehingga dana yang terkumpul dapat disalurkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

a. Transparansi dalam Pengelolaan Zakat

Salah satu elemen kunci dari *Good Amil Governance* adalah transparansi. Kusmilawaty (Kusmilawaty, 2024) menjelaskan bahwa QS. Al-Mu'minun: 8 menekankan pentingnya amanah dalam pengelolaan sumber daya, termasuk zakat. Amanah di sini berarti bahwa pengelola zakat harus bertanggung jawab dan transparan dalam mengelola dana yang diterima. Transparansi berarti bahwa informasi terkait pengumpulan dan penyaluran zakat harus tersedia dan dapat diakses oleh publik. Penyempurnaan sistem pelaporan yang telah

dilakukan oleh institusi zakat memungkinkan masyarakat untuk melihat laporan keuangan, laporan kegiatan, dan informasi lain terkait pengelolaan zakat. Hal ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat wajib memberikan laporan kepada masyarakat.

Transparansi yang tinggi tidak hanya membangun kepercayaan publik, tetapi juga mendorong partisipasi publik dalam pengelolaan zakat. Dengan informasi yang jelas dan akurat, masyarakat dapat lebih memahami bagaimana dana zakat mereka digunakan. Hal ini mengurangi kemungkinan penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan kredibilitas institusi zakat di mata masyarakat. Dalam sebuah studi oleh Ali (Ali, 2020) dijelaskan bahwa lembaga zakat yang menerapkan transparansi akan lebih mampu menarik donasi dan partisipasi dari masyarakat.

b. Akuntabilitas dan Tanggung Jawab

Akuntabilitas adalah prinsip penting lainnya dalam tata kelola zakat. Dalam konteks institusi zakat, akuntabilitas berarti lembaga ini bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam pengelolaan zakat. Termasuk kewajiban untuk menjelaskan bagaimana dana zakat dikelola, serta memberikan penjelasan kepada masyarakat jika terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam pengelolaan.

BAZNAS sebagai Lembaga resmi pemerintah dalam mengelola zakat telah melakukan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dengan memperkenalkan sistem pengendalian internal yang lebih ketat. Pengawasan internal berfungsi untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Ini juga termasuk audit yang dilakukan oleh pihak independen untuk menilai kinerja keuangan dan operasional BAZNAS. Penelitian oleh Wibisono (Wibisono, 2019) menunjukkan bahwa lembaga zakat yang memiliki sistem akuntabilitas yang baik akan lebih mudah menjaga reputasi dan kepercayaan publik.

c. Memperkuat Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang jelas dan terdefinisi dengan baik juga merupakan elemen kunci dalam penerapan *Good Amil Governance*. BAZNAS sendiri telah menyusun struktur organisasi yang memungkinkan setiap individu di dalamnya untuk memahami peran dan tanggung jawab mereka. Dengan pembagian tugas yang jelas, diharapkan setiap bagian organisasi dapat berfungsi secara optimal.

Penguatan struktur organisasi ini juga mencakup pembentukan tim khusus yang bertugas menangani isu-isu strategis, seperti manajemen risiko dan pengembangan program zakat. Tim ini berfungsi sebagai panduan dalam pengambilan keputusan dan memberikan rekomendasi kepada manajemen BAZNAS. Penelitian oleh Amilin (Amilin, 2019) menunjukkan bahwa organisasi yang memiliki struktur yang baik akan lebih mampu menanggapi tantangan yang ada dan mengambil keputusan yang tepat.

d. Proses Pengambilan Keputusan

Proses pengambilan keputusan partisipatif adalah ciri khas tata kelola yang baik. Dalam konteks institusi zakat, keputusan penting terkait pengelolaan zakat harus melibatkan

berbagai pihak, termasuk manajemen, staf, dan perwakilan masyarakat. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, institusi zakat dapat memperoleh perspektif yang lebih luas dan mengurangi kemungkinan bias dalam pengambilan keputusan.

Selain itu, pengambilan keputusan berbasis data juga penting. Institusi zakat perlu menggunakan data dan analitik untuk mendukung setiap keputusan yang diambil. Hal ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas kepada masyarakat. Sejalan dengan hal ini, Denzin dan Lincoln (Denzin & Lincoln, 2000) mencatat bahwa pengambilan keputusan berdasarkan bukti akan menghasilkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan keputusan yang intuitif.

e. Peningkatan Kualitas Pelaporan

Pelaporan berkualitas tinggi merupakan aspek yang tidak dapat diabaikan dalam tata kelola pemerintahan yang baik. BAZNAS telah melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelaporan dengan menyusun laporan yang lebih komprehensif dan informatif. Laporan tersebut tidak hanya mencakup informasi keuangan, tetapi juga analisis dampak dari program zakat yang dilakukan.

Dengan laporan yang berkualitas, masyarakat akan lebih mudah memahami bagaimana dana zakat digunakan dan dampaknya yang dihasilkan. Hal ini juga memberikan kesempatan bagi BAZNAS untuk menunjukkan keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan zakat. Pelaporan yang transparan dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mendapatkan dukungan yang lebih luas dari publik (Hutton, et al., 2006).

f. Tantangan dalam Implementasi

Meskipun BAZNAS telah menerapkan berbagai prinsip *Good Amil Governance*, masih ada tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia. Meskipun sistem pelaporan dan pengendalian internal telah ditingkatkan, kualitas sumber daya manusia yang ada masih belum memadai untuk mengelola kompleksitas pengelolaan zakat dengan baik. Oleh karena itu, BAZNAS perlu menginvestasikan lebih banyak sumber daya dalam pelatihan dan pengembangan staf sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan lebih baik.

Selain itu, tantangan teknologi juga menjadi perhatian. Meskipun telah ada upaya untuk menerapkan sistem teknologi informasi, BAZNAS perlu memastikan bahwa sistem tersebut dapat mendukung semua aspek pengelolaan zakat secara efektif. Ini termasuk mengembangkan platform yang memungkinkan integrasi data, sehingga informasi yang diperlukan dapat diakses dengan mudah.

Penerapan prinsip-prinsip *Good Amil Governance* dalam BAZNAS merupakan langkah penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat. Dengan menerapkan transparansi, akuntabilitas, struktur organisasi yang baik, dan proses pengambilan keputusan partisipatif, BAZNAS dapat membangun kepercayaan publik dan meningkatkan kredibilitasnya dan BAZNAS dapat menjadi teladan bagi institusi zakat yang ada dibawah naungannya. Meski ada tantangan yang harus dihadapi, upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi harus terus dilakukan agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara optimal. Keberhasilan penerapan prinsip-prinsip tersebut akan

memberikan dampak positif bagi masyarakat, sehingga tujuan zakat sebagai instrumen sosial dapat tercapai.

Sustainable Development Goals

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda global yang diadopsi oleh semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015, dengan tujuan untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet, dan memastikan kesejahteraan bagi semua orang pada tahun 2030. SDGs memiliki 17 tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

- a. Tanpa Kemiskinan (*No Poverty*)
- b. Tanpa Kelaparan (*Zero Hunger*)
- c. Kehidupan Sehat dan Sejahtera (*Good Health and Well-Being*)
- d. Pendidikan Berkualitas (*Quality Education*)
- e. Kesetaraan Gender (*Gender Equality*)
- f. Air Bersih dan Sanitasi Layak (*Clean Water and Sanitation*)
- g. Energi Bersih dan Terjangkau (*Affordable and Clean Energy*)
- h. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (*Decent Work and Economic Growth*)
- i. Industri, Inovasi dan Infrastruktur (*Industry, Innovation, and Infrastructure*)
- j. Berkurangnya kesenjangan (*Reduced Inequality*)
- k. Kota dan permukiman yang berkelanjutan (*Sustainable Cities and Communities*)
- l. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (*Responsible Consumption and Production*)
- m. Penanganan perubahan iklim (*Climate Action*)
- n. Ekosistem lautan (*Life Below Water*)
- o. Ekosistem daratan (*Life on Land*)
- p. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh (*Peace, Justice, and Strong Institutions*)
- q. Kemitraan untuk mencapai tujuan (*Partnerships for The Goals*).

Zakat sebagai instrumen keuangan Islam memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian SDGs, khususnya SDGs 1, SDGs 2, SDGs 3, SDGs 4, SDGs 8, dan SDGs 10 (Muharromah, 2021).

Tujuan *Sustainable Development Goals* yang pertama adalah "Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di mana-mana". Tujuan ambisius ini bertujuan untuk memberantas kemiskinan ekstrem, yang didefinisikan sebagai hidup dengan kurang dari \$1,25 per hari, pada tahun 2030. Di luar ini, SDG 1 juga berupaya untuk mengurangi kemiskinan dalam semua dimensinya, sesuai dengan definisi nasional. Pendekatan yang lebih luas ini mengakui bahwa kemiskinan mencakup lebih dari sekadar pendapatan, termasuk akses ke layanan penting, sumber daya ekonomi, dan infrastruktur dasar (Chansanam & Li, 2022).

Beberapa target dan indikator mendukung SDG 1, termasuk menerapkan sistem perlindungan sosial, memastikan kesetaraan hak atas sumber daya ekonomi, dan membangun ketahanan di antara masyarakat miskin dan rentan. Target-target ini membahas sifat multi-dimensi kemiskinan dan bertujuan untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan berkelanjutan untuk semua. Mencapai SDG 1 membutuhkan data terperinci

untuk memahami dinamika kemiskinan di tingkat lokal dan menginformasikan intervensi yang efektif. Ini juga memerlukan mobilisasi sumber daya yang signifikan dan kerangka kebijakan yang baik di semua tingkatan.

Tujuan *Sustainable Development Goals* yang kedua bertujuan untuk "Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi dan mempromosikan pertanian berkelanjutan". Ini mencakup beberapa tujuan utama:

- a. **Mengakhiri kelaparan dan kekurangan gizi:** Memastikan semua orang, terutama yang miskin dan rentan, memiliki akses ke makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun. Ini termasuk mengatasi semua bentuk kekurangan gizi, seperti stunting dan wasting pada anak di bawah lima tahun. Pada tahun 2020, lebih dari 2 miliar orang tidak memiliki akses reguler ke makanan yang aman, bergizi, dan cukup, dan 3 miliar tidak mampu membeli makanan sehat (Braun & Clarke, 2006). Meskipun ada beberapa kemajuan, lebih dari 790 juta orang masih menderita kelaparan.
- b. **Mempromosikan pertanian berkelanjutan:** Ini melibatkan penggandaan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen pangan skala kecil, memastikan sistem produksi pangan berkelanjutan, dan menerapkan praktik pertanian yang tangguh. Praktik-praktik ini harus meningkatkan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, dan memperkuat kapasitas untuk adaptasi terhadap perubahan iklim dan peristiwa cuaca ekstrem. Menjaga keanekaragaman genetik benih dan tanaman budidaya juga penting untuk ketahanan pangan jangka panjang.
- c. **Meningkatkan nutrisi:** Tujuan ini menekankan pentingnya tidak hanya akses ke makanan, tetapi juga akses ke makanan bergizi. Ini sangat penting bagi populasi yang rentan seperti anak-anak, wanita hamil dan menyusui, dan orang tua.

Mencapai SDG 2 membutuhkan pendekatan multidimensi termasuk meningkatkan investasi dalam infrastruktur pedesaan, penelitian dan pengembangan pertanian, dan mempromosikan sistem produksi berkelanjutan. Makanan juga diakui penting untuk keamanan nasional, ekonomi, lapangan kerja, energi, dan sejarah. Selain itu, kerawanan pangan terkait dengan kualitas sumber daya manusia, menyoroti pentingnya mengatasi masalah ini untuk pembangunan secara keseluruhan (Pertiwinigrum, Setianto, Supriadi, Wuri, & Prabowo, 2019).

Tujuan *Sustainable Development Goals* yang ketiga adalah "Memastikan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua orang di segala usia" (*Goal 3 - Good Health and Well-Being*, 2024). *Sustainable Development Goal 3* (SDG 3) berfokus pada kesehatan yang baik dan kesejahteraan, dengan tujuan untuk memastikan kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Untuk mencapai tujuan ini, berbagai isu kesehatan perlu ditangani secara menyeluruh, termasuk kesehatan ibu dan anak, penyakit menular, penyakit tidak menular, penyalahgunaan zat, keselamatan jalan raya, kesehatan universal, kesehatan seksual dan reproduksi, risiko kesehatan lingkungan, serta penelitian dan pengembangan kesehatan.

Memastikan pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua adalah tujuan dari *Sustainable Development Goals* yang keempat. (*Goal 4 – Quality Education*, 2024). Pentingnya pendidikan berkualitas secara intrinsik terkait dengan berbagai SDGs lainnya. Sehingga, SDG 4 bertindak sebagai katalis untuk tujuan pembangunan berkelanjutan lainnya. Interkonektivitas SDG 4 dengan tujuan lain misalnya dapat kita lihat dari pendidikan berkualitas yang merupakan dasar

untuk mencapai tujuan terkait pengentasan kemiskinan (SDG 1), kesetaraan gender (SDG 5), dan pekerjaan yang layak, serta pertumbuhan ekonomi (SDG 8) (Sezgin, Turhan, Sart, & Danilina, 2023). Peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya meningkatkan produktivitas individu tetapi juga dapat berkontribusi pada keadilan sosial dan pembangunan ekonomi. Hal ini akan memperkuat pentingnya SDG 4 sebagai landasan untuk terwujudnya SDGs lainnya (Arruda, 2024). Kesimpulannya, SDG 4 berfungsi sebagai pilar mendasar dalam mengejar pembangunan berkelanjutan, serta memengaruhi dan dipengaruhi oleh banyak tujuan lainnya. Keberhasilannya membutuhkan upaya bersama dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa pendidikan berkualitas dapat diakses oleh semua orang. Dengan ini, diharapkan dapat mendorong masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Tujuan *Sustainable Development Goal 8* (SDG 8) berfokus pada mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berkelanjutan, lapangan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua. (*Goal 8 – Decent Work and Economic Growth*, 2024). Tujuan ini sangat penting karena memenuhi kebutuhan akan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya kuat tetapi juga adil, memastikan bahwa semua individu dapat memperoleh manfaat dari kemajuan ekonomi. Keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja adalah tema sentral dalam diskusi seputar SDG 8. Tema ini menyoroti pentingnya menciptakan peluang kerja yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Salah satu aspek kunci dari SDG 8 adalah promosi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Ini melibatkan penciptaan lingkungan di mana semua individu, terlepas dari latar belakang mereka, memiliki akses yang sama ke peluang ekonomi. Anindyntha menekankan bahwa pertumbuhan inklusif sangat penting untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, terutama dalam konteks negara-negara ASEAN, di mana kesenjangan peluang ekonomi dapat menghambat kemajuan secara keseluruhan (Anindyntha, 2023). Peran lapangan kerja dalam pertumbuhan ekonomi adalah faktor penting lainnya. Penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mengarah pada penciptaan lapangan kerja, yang pada gilirannya mendorong pembangunan ekonomi lebih lanjut. Misalnya, Dahal dan Rai menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi sering disertai dengan peningkatan kesempatan kerja, terutama di negara berkembang (Dahal & Rai, 2019). Kesimpulannya, SDG 8 adalah tujuan yang mencakup berbagai dimensi pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berkelanjutan membutuhkan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan inklusi keuangan, kondisi kerja yang layak, dan promosi kebijakan ekonomi yang inklusif. Dengan mengatasi aspek-aspek yang saling berhubungan ini, negara-negara dapat bekerja untuk memenuhi SDG 8 dan mendorong masa depan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Sustainable Development Goal 10 (SDG 10) berupaya mengurangi ketidaksetaraan di dalam dan di antara negara. SDG 10 mengakui bahwa kesenjangan ekonomi dapat menghambat pembangunan dan kohesi sosial secara keseluruhan. Tujuan ini menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi inklusif yang menguntungkan semua segmen masyarakat, terutama kelompok yang terpinggirkan dan kurang beruntung. Sifat ketidaksetaraan yang beragam mencakup berbagai dimensi, termasuk pendapatan,

kesehatan, pendidikan, dan akses ke sumber daya, yang memerlukan pendekatan komprehensif untuk mengatasi kesenjangan ini. (*Goal 10 – Reduced Inequalities*, 2024)

Salah satu tujuan utama SDG 10 adalah untuk meningkatkan keterwakilan negara-negara berkembang di pasar internasional, sehingga memfasilitasi partisipasi ekonomi yang lebih besar dan mengurangi ketidaksetaraan antar negara. Küfeoğlu menyoroti bahwa meningkatkan akses ke investasi asing langsung dan bantuan pembangunan pemerintah sangat penting untuk mencapai tujuan ini, karena dapat mengarah pada hasil ekonomi dan sosial budaya yang positif. Perspektif ini sejalan dengan temuan Setyadi dkk., yang menekankan peran Indeks Pembangunan Manusia dan pencapaian pendidikan dalam mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Indonesia, menunjukkan bahwa investasi yang ditargetkan di bidang-bidang ini dapat membantu mengurangi kesenjangan (Setyadi, Indriyani, & Resmawati, 2022).

Hal ini digaungkan oleh Layasari dkk., yang menegaskan bahwa meningkatkan kesempatan pendidikan dapat mengarah pada pembangunan ekonomi yang lebih adil, terutama di daerah yang ditandai dengan kesenjangan yang signifikan (Layasari, Syamsurijal, & Suhel, 2021). Selain pendidikan, peran kebijakan sosial dalam mengatasi ketimpangan pendapatan tidak dapat diabaikan. Penelitian oleh Adeleye menunjukkan bahwa lembaga yang berkualitas dan kebijakan sosial yang efektif dapat meningkatkan inklusivitas dan distribusi sumber daya yang adil, sehingga mengurangi kesenjangan ekonomi (Adeleye, 2024).

Hal ini menunjukkan bahwa mengatasi ketidaksetaraan tidak hanya membutuhkan langkah-langkah ekonomi tetapi juga upaya untuk menumbuhkan kohesi sosial dan kesadaran publik mengenai implikasi ketidaksetaraan. Kesimpulannya, mencapai SDG 10 memerlukan pendekatan multifaset yang membahas berbagai dimensi ketidaksetaraan, termasuk kesenjangan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Dengan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan akses ke pendidikan dan perawatan kesehatan yang berkualitas, dan menerapkan kebijakan sosial yang efektif, negara-negara dapat bekerja untuk mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam maupun di antara negara. Sifat yang saling berhubungan dari isu-isu ini menggarisbawahi pentingnya strategi holistik dalam mengejar pembangunan berkelanjutan (Rifani, Taufiq, & Sholihin, 2023).

Dampak Zakat terhadap Pencapaian SDGs

Zakat memiliki dampak yang signifikan terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Terdapat sejumlah penelitian yang menunjukkan bagaimana zakat dapat berkontribusi secara signifikan terhadap berbagai aspek pembangunan berkelanjutan, termasuk pengurangan kemiskinan, peningkatan pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

a. Dampak Zakat terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Kemiskinan

Salah satu penelitian yang relevan adalah oleh Murniati dan Beik, yang menganalisis program distribusi zakat BAZNAS di Kota Bogor. Penelitian ini menemukan bahwa distribusi zakat memiliki dampak positif terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pengurangan tingkat kemiskinan di kalangan mustahik. Dengan

menggunakan t-statistics dan indikator-indikator kemiskinan, hasil menunjukkan bahwa ada peningkatan yang signifikan dalam kualitas hidup mustahik setelah menerima zakat (Murniati & Beik, 2014).

Lutfi (Lutfi, 2023) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) memiliki pengaruh positif terhadap IPM di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pengumpulan dan distribusi zakat dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, yang tercermin dalam IPM. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

Sari (Sari, Nasrun, & Putri, 2020) melakukan analisis mengenai pengaruh IPM dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan IPM berhubungan negatif dengan tingkat kemiskinan, yang berarti bahwa semakin tinggi IPM, semakin rendah tingkat kemiskinan. Ini menunjukkan bahwa zakat, yang berkontribusi pada peningkatan IPM, juga berpotensi untuk mengurangi kemiskinan.

b. Pengaruh Zakat terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Muttaqin dalam penelitiannya di Pulau Jawa juga menunjukkan bahwa zakat berperan dalam merangsang pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Penelitian ini menggunakan data panel dari seluruh provinsi di Pulau Jawa selama periode 2010-2020 dan menemukan bahwa zakat memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel-variabel seperti pertumbuhan ekonomi, indeks gini, dan indeks pembangunan gender (Muttaqin, 2024). Ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan, tetapi juga sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Fadilah (Fadilah, 2023) berargumen bahwa zakat dapat dianggap sebagai investasi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya. Dengan mengalokasikan dana zakat secara strategis, pemerintah dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas.

c. Zakat sebagai Instrumen Keuangan Nasional

Zakat sebagai instrumen keuangan nasional memiliki potensi yang signifikan dalam mendukung pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Ascarya (Ascarya, 2021) menjelaskan bahwa selama pandemi COVID-19, zakat berperan penting dalam pemulihan ekonomi Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga zakat dapat memanfaatkan teknologi finansial (fintech) untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat secara lebih efisien. Dengan memanfaatkan *crowdfunding* dan *peer-to-peer (P2P) lending*, zakat dapat diakses oleh lebih banyak orang dan digunakan untuk mendukung usaha kecil serta program-program sosial yang mendesak.

Hassan (Hassan, 2024) membahas potensi zakat di tingkat nasional dan integrasinya dalam kerangka fiskal. Penelitian ini menunjukkan bahwa zakat dapat berkontribusi pada stabilitas ekonomi dengan mengontrol inflasi dan resesi. Dengan menginstitusionalisasi

zakat, pemerintah dapat memanfaatkan dana zakat untuk mendukung program-program sosial dan ekonomi yang lebih luas.

Secara keseluruhan, zakat sebagai instrumen keuangan nasional memiliki potensi yang besar untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Dengan pengelolaan yang efektif dan integrasi dalam kerangka fiskal, zakat dapat berfungsi sebagai alat yang kuat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

d. Kontribusi Zakat terhadap Kesejahteraan Sosial

Triyowati et al. juga mengungkapkan bahwa distribusi zakat, infaq, dan sadaqah berkontribusi signifikan terhadap kesejahteraan sosial dan pengembangan usaha mikro dan kecil di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang kuat antara distribusi zakat dan indikator-indikator pembangunan manusia, serta tren yang menunjukkan pencapaian beberapa tujuan SDGs pada tahun 2030 (Triyowati & Masnita, 2018).

Penelitian oleh Riyaldi (Riyaldi, Suriani, & Nurdin, 2020) menunjukkan bahwa zakat dapat berfungsi sebagai sumber dana untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengatasi kemiskinan. Dalam studi ini, zakat diidentifikasi sebagai alat yang efektif untuk mendukung usaha kecil yang dijalankan oleh mustahik (penerima zakat), yang pada gilirannya dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup mereka (Riyaldi, Suriani, & Nurdin, 2020). Selain itu, Alshater (Alshater, Saad, Wahab, & Saba, 2021) menekankan bahwa zakat berfungsi sebagai katalisator untuk pembangunan ekonomi dan keadilan sosial, yang sejalan dengan tujuan SDGs.

e. Zakat dan Pengurangan Kemiskinan Multidimensional

Aziz et al. menyoroti hubungan antara zakat dan pengurangan kemiskinan multidimensional. Penelitian ini menunjukkan bahwa zakat memiliki pengaruh signifikan terhadap enam tujuan SDGs, termasuk pengembangan ekonomi, pendidikan, dan penyediaan fasilitas kesehatan. Penelitian ini menekankan pentingnya sistem manajemen zakat yang efisien untuk mengurangi kemiskinan multidimensional di negara-negara Muslim yang sedang berkembang. Aditya (Aditya & Wahed, 2021) menunjukkan bahwa zakat dapat berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Penelitian ini menekankan bahwa pengelolaan zakat yang baik dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Pratama (Pratama, 2023) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa zakat dapat berkontribusi pada pengurangan kemiskinan multidimensional dengan mempengaruhi beberapa tujuan SDGs, termasuk pengentasan kemiskinan (SDG 1) dan pengurangan ketimpangan (SDG 10). Penelitian ini menunjukkan bahwa alokasi zakat yang tepat dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup mereka, yang pada gilirannya berkontribusi pada pengurangan kemiskinan multidimensional.

f. Optimalisasi Distribusi Zakat

Zunaidi meneliti upaya optimalisasi distribusi dan pemanfaatan dana zakat dalam implementasi SDGs. Penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS di Kediri telah melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan distribusi zakat, yang berkontribusi pada

pencapaian SDGs (Zunaidi, 2023). Ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang baik dapat meningkatkan dampak sosial dan ekonomi dari zakat.

Salleh (Salleh, Rasid, & Basiruddin, 2022) menyoroti pentingnya optimalisasi distribusi zakat melalui teknologi digital untuk mencapai tujuan SDGs. Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan memanfaatkan teknologi, lembaga zakat dapat meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan dan distribusi zakat, sehingga lebih banyak dana dapat digunakan untuk program-program yang langsung berdampak pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesehatan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih terintegrasi dan berbasis teknologi dalam pengelolaan zakat dapat memperkuat kontribusi zakat terhadap pencapaian SDGs.

Dapat disimpulkan bahwa zakat memiliki dampak yang signifikan terhadap pencapaian SDGs, terutama dalam hal pengurangan kemiskinan, peningkatan pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Untuk memaksimalkan dampak ini, penting bagi lembaga zakat untuk menerapkan praktik pengelolaan yang transparan dan efisien, serta berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

3.2. Pembahasan

Tantangan Integrasi *Good Amil Governance* dalam Pencapaian SDGs

Integrasi *Good Amil Governance* (GAG) dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian khusus. GAG, yang berfokus pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan zakat dan sumber daya sosial lainnya, dapat berkontribusi signifikan terhadap pencapaian SDGs, terutama dalam konteks pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, tantangan dalam implementasinya sering kali menghambat efektivitas pencapaian tujuan tersebut.

Tantangan Integrasi *Good Amil Governance* dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman

Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya GAG di kalangan pengelola zakat dan masyarakat umum. Banyak pihak yang belum sepenuhnya memahami bagaimana GAG dapat berkontribusi pada pencapaian SDGs, terutama dalam konteks pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan (Sari, Nasrun, & Putri, 2020).

2. Keterbatasan Sumber Daya

Pengelolaan zakat dan sumber daya sosial lainnya sering kali dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, baik dari segi finansial maupun manusia. Hal ini menghambat kemampuan lembaga amil untuk menerapkan prinsip-prinsip GAG secara efektif, yang pada gilirannya mempengaruhi pencapaian SDGs (Yulia, 2024).

3. Regulasi dan Kebijakan yang Tidak Mendukung

Kebijakan dan regulasi yang ada sering kali tidak cukup mendukung integrasi GAG dalam pengelolaan zakat. Misalnya, kurangnya kerangka hukum yang jelas mengenai

pengelolaan zakat dapat menghambat transparansi dan akuntabilitas yang diperlukan untuk mencapai SDGs.

4. Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan

Integrasi GAG memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga amil, dan masyarakat. Namun, sering kali terdapat kesenjangan dalam komunikasi dan kolaborasi antar pihak yang terlibat, yang dapat menghambat upaya pencapaian SDGs (Simanjuntak, 2024).

Peluang untuk Meningkatkan Integrasi *Good Amil Governance* dalam Pencapaian SDGs

Integrasi *Good Amil Governance* dalam pencapaian SDGs di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, namun juga menawarkan peluang untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat dan sumber daya sosial lainnya. Peluang-peluang tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendidikan dan Pelatihan

Meningkatkan pendidikan dan pelatihan tentang GAG bagi pengelola zakat dan masyarakat dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya prinsip-prinsip tersebut dalam pencapaian SDGs. Program-program pelatihan yang melibatkan berbagai pihak dapat membantu membangun kapasitas dan keterampilan yang diperlukan (Nurfalah, 2025).

2. Pengembangan Kebijakan yang Mendukung

Mengembangkan kebijakan yang mendukung integrasi GAG dalam pengelolaan zakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pencapaian SDGs. Kebijakan yang jelas dan terarah dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya.

3. Penggunaan Teknologi Informasi

Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat dapat menjadi solusi yang efektif. Platform digital dapat digunakan untuk melaporkan penggunaan dana zakat dan dampaknya terhadap pencapaian SDGs, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat (Handayani, 2024).

4. Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan

Mendorong kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah, lembaga amil, dan masyarakat dapat meningkatkan efektivitas integrasi GAG. Forum-forum dialog dan kerja sama dapat membantu menciptakan sinergi dalam upaya pencapaian SDGs (Simanjuntak, 2024).

Dengan meningkatkan kesadaran, mengembangkan kebijakan yang mendukung, memanfaatkan teknologi, dan mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan, Indonesia dapat memperkuat upayanya dalam mencapai SDGs dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

4. KESIMPULAN

Kajian ini mengungkapkan bahwa tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan *Good Amil Governance* (GAG) dengan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya GAG di kalangan pengelola zakat dan masyarakat umum, sumber daya yang terbatas dalam pengelolaan zakat, kebijakan dan regulasi yang ada sering kali tidak cukup mendukung integrasi GAG dalam pengelolaan zakat, dan kurangnya koordinasi antar Pemangku Kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga amil, dan masyarakat.

Namun, dalam menghadapi tantangan tersebut, kita masih memiliki beberapa peluang, yaitu dengan meningkatkan pendidikan dan pelatihan tentang GAG bagi pengelola zakat dan masyarakat dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya prinsip-prinsip tersebut dalam pencapaian SDGs, mengembangkan kebijakan yang mendukung integrasi GAG dalam pengelolaan zakat untuk dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pencapaian SDGs, Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, dan mendorong kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah, lembaga amil, dan masyarakat dapat meningkatkan efektivitas integrasi GAG.

5. REFERENSI

- Adeleye, B. (2024). Does institutional quality moderate the human capital–inequality dynamics? comparative evidence from lac and ssa countries. *African Development Review*, 153-169.
- Aditya, I., & Wahed, M. (2021). Pengaruh pendapatan asli daerah dan pengangguran terhadap indeks pembangunan manusia dengan kemiskinan sebagai variabel intervening di provinsi bali. *Jurnal Randai*, 1-10.
- Ahyani, H., Lousada, S., Solehudin, E., Azmi, N., Hamzah, I., & Suganda, A. (2025). Building Progressive Islamic Law in Zakat Distribution to Support Sustainable Development Goals: A Maqasid Sharia Perspective in Indonesia. *Journal of Lifestyle and SDGs Review*, 4071.
- Ali, M. (2020). Zakat dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Filantropi Islam*, 45–60.
- Alshater, M., Saad, R., Wahab, N., & Saba, I. (2021). What do we know about zakat literature? a bibliometric review. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 544-563.
- Alshehadeh, A. (2024). The effect of digital zakat and accounting on corporate sustainability through financial transparency. *Asian Economic and Financial Review*, 228-249.
- Amilin. (2019). Akuntabilitas dan transparansi dalam lembaga zakat. *Jurnal Akuntansi Islam dan Riset Bisnis*, 197–211.
- Anindynta, F. (2023). Analysis of inclusive growth in asean countries. *Optimum Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 231-241.
- Arruda, E. (2024). Artificial intelligence for sdg 4 of the 2030 agenda: transforming education to achieve quality, equality, and inclusion. *Sustain*, 34.

- Ascarya, A. (2021). The role of islamic social finance during covid-19 pandemic in indonesia's economic recovery. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 386-405.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using Thematic Analysis in Psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 77–101.
- Chansanam, W., & Li, C. (2022). Scientometrics of Poverty Research for Sustainability Development: Trend Analysis of the 1964–2022 Data through Scopus. *Sustainability*, 5339.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage.
- Dahal, M., & Rai, H. (2019). Employment intensity of economic growth: evidence from nepal. *Economic Journal of Development Issues*, 34-47.
- Denzin, N., & Lincoln, Y. (2000). *Handbook of Qualitative Research (2nd ed.)*. Sage.
- Fadilah, S. (2023). Performance measurement of zakat utilization: the effectiveness of zakat distribution. *Kne Social Sciences*.
- Handayani, E. (2024). Developing an instrument and assessing sdgs implementation in indonesian higher education. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 577-590.
- Hassan, M. (2024). The national-level potential of zakat and its integration into the fiscal framework: sector-specific insights from the economy of bangladesh. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 146-169.
- Hutton, J., McGrath, C., Frybourg, J., Tremblay, M., Bramley-Harker, E., & Henshall, C. (2006). Framework for describing and classifying decision-making systems using technology assessment to determine the reimbursement of health technologies (fourth hurdle systems). *International Journal of Technology Assessment in Health Care*, 10-18.
- Isman, A. F., & Amalia, E. (2022). Relevance of maqasid al-shari'ah for achievement sustainable development goals (sdgs) on zakat institutions in indonesia. *Proceedings of the 3rd International Conference of Islamic Finance and Business*. Jakarta: ICIFEB.
- Kusmilawaty. (2024). Good corporate governance sebagai implementasi amanah dalam al-qur'an (tafsir qs. al-mu'minin). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1045.
- Layasari, I., Syamsurijal, S., & Suhel, S. (2021). Analysis of the influence of economic potential on inequality of economic zones between regencies / cities in south sumatra province. *Accounting and Finance*, 130-135.
- Lutfi, M. (2023). Analisis pengaruh zakat, infaq, shadaqah (zis), indeks pembangunan manusia (ipm), tingkat pengangguran terbuka (tpt), dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi sumatera barat tahun 2017-2020. *Jur'i*, 70-83.
- Miles, M., Huberman, A., & Saldana, J. (2014). *Analisis data kualitatif: Buku sumber metode (edisi ke-3)*. Sage.
- Muharromah, G. (2021). Paradigma sdgs dalam manajemen zakat di indonesia. *Malia (Terakreditasi)*, 1-16.

- Murniati, R., & Beik, I. (2014). Pengaruh zakat terhadap indeks pembangunan manusia dan tingkat kemiskinan mustahik: studi kasus pendayagunaan baznas kota bogor. *Al-Muzara Ah*, 135-149.
- Muttaqin, Z. (2024). Can zakat contribute to achieving sustainable development goals? a case study on java island, indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 35-53.
- Narulitasari, D. (2023). Zakat accounting and public accountability: evidence from indonesia. *Jifa (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 45-59.
- Nurfalah, Q. (2025). Integrasi kewirausahaan sosial dan berkelanjutan untuk mendorong prinsip esg dalam model bisnis inovatif. *JEKI*, 53-63.
- Nurhasanah, N. (2023). Zakat & Sustainable Development Goals (SDGs): A Review. *Ekonomi Islam Indonesia*, 5(2).
- Othman, Y. H., Yusuff, M. S., & Moawad, A. M. (2021). Analyzing zakat as a social finance instrument to help achieve the sustainable development goals in kedah. *Studies of Applied Economics*, 39(10).
- Pertiwinigrum, A., Setianto, A., Supriadi, Wuri, M., & Prabowo, T. (2019). Mapping of resources and potential development for food-secure region in east seram, maluku province, indonesia. *International Journal of Recent Technology and Engineering*, 4143-4147.
- Pratama, S. (2023). The role of zakat in alleviating multidimensional poverty. *International Journal of Islamic Economics and Finance (Ijief)*.
- Rifani, R., Taufiq, M., & Sholihin, A. (2023). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)(Studi Kasus Baznas Kota Payakumbuh). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2732-2743.
- Riyaldi, M., Suriani, S., & Nurdin, R. (2020). Optimization zakat for sustainable development goals: evidence from baitul mal aceh. *International Conference of Zakat*, 339-354.
- Rizal, R., Ghofur, R., & Utami, P. (2023). The role of muslim generation community at zakat collection on realizing sustainable development goals (sdgs) in the era of digital society 5.0. *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 105.
- Salleh, W., Rasid, S., & Basiruddin, R. (2022). Optimising digital technology in managing zakat. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*.
- Sari, Y., Nasrun, A., & Putri, A. (2020). Analisis pengaruh indeks pembangunan manusia dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di provinsi kepulauan bangka belitung tahun 2010-2017. *Equity Jurnal Ekonomi*, 1-13.
- Setyadi, S., Indriyani, L., & Resmawati, R. (2022). Estimating the impact of social and economic factors on income inequality in indonesia. *Buletin Studi Ekonomi*, 53.
- Sezgin, F., Turhan, G., Sart, G., & Danilina, M. (2023). Impact of financial development and remittances on educational attainment within the context of sustainable development: a panel evidence from emerging markets. *Sustainability*, 12322.
- Simanjuntak, L. (2024). Analisis kolaborasi penta-helix dalam implementasi sustainable development goals pada program desa berdaya - taman inspirasi

- waibu. *Jurnal Ekonomika Manajemen Akuntansi Dan Perbankan Syariah*, 100-111.
- Syaifuddin, T. (2019). Implementation of data envelopment analysis (dea) in measuring the efficiency zakat fund management. *Indonesian Journal of Islamic Economics Research*, 50-57.
- Triyowati, H., & Masnita, Y. (2018). Toward 'sustainable development' through zakat-infaq-sadaqah distributions – as inclusive activities – for the development of social welfare and micro and small enterprises. *Australian Journal of Islamic Studies*, 24-44.
- Wahyuni, P. (2024). Zakat and poverty alleviation in muslim countries: a biblioshiny application. *La_riba*, 205-230.
- Wibisono, M. (2019). E-zakat: Teknologi dalam filantropi Islam. *Jurnal Filantropi Islam*, 78–92.
- Yulia, N. (2024). Wujudkan sustainable development goals melalui sadar wirausaha mandiri sejak dini (sawiri) bagi remaja ipnu dan ippnu di kabupaten bojonegoro. *Kacanegara Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 225.
- Zunaidi, A. (2023). Optimizing zakat fund distribution and utilization in the implementation of sustainable development goals (sdgs). *leibzawa*, 107-126.